

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aries Djaenuri, Enceng, *Sistem Pemerintah Daerah*, PT Ghalia Indonesia, Bogor, 2015.
- Amin, *Memahami Keuangan Daerah*, Pontianak: Indomedia Pustaka, 2017.
- Arsan Latif, dkk, *Buku pintar Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta, 2019.
- Bachrul Amiq, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta: 2010.
- Erlina, dkk, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*, Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Murtir Jeddawi, *Memahami Keuangan Daerah*, PIndomedia Pustaka, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT Gramedia, Jakarta: 2013.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012.
- Suwandi, *Implementasi Pengelolaan Keuangan daerah Tata Kelola Menuju Pemerintahan yang Baik*, Penerbit CV. Ureka Media Aksara, 2022.
- Tjip Ismail, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Penerbit Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2019.
- Yunasman, dkk, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP STIN YKPN, 2019.
- Yusnani Hasyimzoem, dkk, *Hukum Pemerintah Daerah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2017.
- Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru, 2015.

B. Skripsi dan Jurnal

- Emi Ramon, "Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tanjung Lolo Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung", *Skripsi Universitas Andalas*, 2020.

- Rifa' Rosyaadah, "Peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan Dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah", *Skripsi Universitas Negeri Semarang*, 2020.
- Aprianus Edwin Gendong, dkk, "Analisi Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 9, 2024.
- Putu Gede Satya Wiguna, dkk, "Mekanisme Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 5. No. 2, 2024.
- Greg Suripatty, dkk, "Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Mencegah Korupsi di Daerah", *Jurnal PAMALI : Pattimura Magister Law Riview*, Vol. 3 No. 2, 2023.
- Astuti dan Tamitha Intassar Husen, "Peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue Dalam Penyusunan Rencana Kerja Daerah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2. No. 3, 2023.
- Azis Setyagama dan M Yudi Firmansyah, "Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dalam Menjalankan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah *Jurnal IUS : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Vol. X, 2022.
- Tito Aditya Perdana, dkk, "Mengukur Kinerja APBD Kota Surabaya Analisis Value For Money", *Jurnal INOVASI*, Vol. 16, No. 2, 2020.
- Bawen Nul Hakim, "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah", *Jurnal Penelitian*, Vol. 3, No. 2, 2019.
- Ridha Kurniawan, "Mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan APBD Oleh Pemerintah Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Indonesia", *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Erwin Saraswati, "Efisiensi dan Efektivitas Manajemen Keuangan Daerah", *Jurnal SNKN : Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2018.
- Marlin Pareda, "Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud", *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 8, No. 2, 2017.
- Siti Nurbaeti, "Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*", Vol.5 No.1, 2017.
- Nurhandayani, "Peran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 13, No. 3, 2024.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah
Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

Qanun Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Kota Subulussalam

D. Internet

Wahana News, “Angka Defisit Pemko Subulussalam Membengkak”
<https://serambi.wahananews.co/utama/angka-defisit-pemko-subulussalam-membengkak-mnzt1u8d07>

Serambinews, “Fokus Tekan Defisit, Sekda Subulussalam”
<https://aceh.tribunnews.com/2024/01/08/fokus-tekan-defisit-sekda-subulussalam-visi-misi-pimpinan-dan-pokir-dprk-ditiadakan>